

BI 7-Day Reverse Repo Rate Tetap 3,50%

Rapat Dewan Gubernur (RDG) Bank Indonesia pada 19-20 Januari 2022 memutuskan untuk mempertahankan :

BI 7-Day Reverse Repo Rate (BI7DRR) sebesar **3,50%**

Suku Bunga Deposit Facility (DF) sebesar **2,75%**

Suku Bunga Lending Facility (LF) sebesar **4,25%**

PROSPEK 2022



PERTUMBUHAN EKONOMI
4,7-5,5%



TRANSAKSI BERJALAN
Defisit 1,1% - 1,9% dari PDB



INFLASI
3,0% ± 1%



PERTUMBUHAN KREDIT
6%-8%



PERTUMBUHAN DPK
7%-9%

ARAH BAURAN KEBIJAKAN BANK INDONESIA TAHUN 2022 UNTUK MENJAGA STABILITAS DAN MEMPERKUAT PEMULIHAN EKONOMI NASIONAL

Pro Stability : Kebijakan Moneter

Pro Growth : Kebijakan Makroprudensial, Sistem Pembayaran, Pendalaman Pasar Keuangan dan Keuangan Inklusif

Keputusan ini sejalan dengan perlunya menjaga stabilitas inflasi, nilai tukar, dan sistem keuangan serta upaya untuk mendukung pertumbuhan ekonomi, di tengah tekanan eksternal yang meningkat. Menegaskan pernyataan dalam Pertemuan Tahunan Bank Indonesia 2021 tanggal 24 November 2021, bauran kebijakan Bank Indonesia pada tahun 2022 diarahkan untuk menjaga stabilitas dengan tetap mendukung upaya pemulihan ekonomi nasional. Dalam hal ini, kebijakan moneter tahun 2022 akan lebih diarahkan untuk menjaga stabilitas, sementara kebijakan makroprudensial, sistem pembayaran, pendalaman pasar uang, serta ekonomi-keuangan inklusif dan hijau, tetap untuk mendorong pertumbuhan ekonomi. Bank Indonesia terus memperkuat sinergi kebijakan dengan Pemerintah dan Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) dalam rangka akselerasi vaksinasi dan pembukaan sektor-sektor ekonomi, koordinasi fiskal dan moneter, mendorong kredit/pembiayaan kepada dunia usaha pada sektor-sektor prioritas, untuk menjaga stabilitas makroekonomi dan sistem keuangan serta mendorong pemulihan ekonomi nasional.

ARAH BAURAN KEBIJAKAN BI 2022 :

- Kebijakan moneter tahun 2022 akan lebih diarahkan untuk menjaga stabilitas sekaligus untuk memitigasi dampak rentetan global dari normalisasi kebijakan di negara maju, khususnya Bank Sentral AS (The Fed);
 - Memperkuat kebijakan nilai tukar Rupiah untuk menjaga stabilitas nilai tukar yang sejalan dengan fundamental ekonomi dan mekanisme pasar.
 - Melakukan normalisasi kebijakan likuiditas dengan tetap memastikan kemampuan perbankan dalam penyaluran kredit/pembiayaan kepada dunia usaha dan partisipasi dalam pembelian SBN untuk pembiayaan APBN. Normalisasi likuiditas dilakukan dengan menaikkan secara bertahap GWM (Giro Wajib Minimum) Rupiah untuk BUK (Bank Umum Konvensional)
 - Melakukan normalisasi kebijakan likuiditas dengan menaikkan secara bertahap GWM Rupiah untuk BUS (Bank Umum Syariah) dan UUS (Unit Usaha Syariah).
 - Memberikan jasa giro sebesar 1,5% kepada BUK, BUS, dan UUS yang memenuhi kewajiban GWM dalam rupiah secara rata-rata sebagaimana tersebut pada butir b dan c.
- Memperkuat kebijakan makroprudensial akomodatif tahun 2022 untuk meningkatkan kredit/pembiayaan perbankan kepada dunia usaha guna mendukung pemulihan ekonomi nasional dengan tetap turut menjaga stabilitas sistem keuangan;
 - Memberikan insentif bagi bank-bank yang menyalurkan kredit/pembiayaan kepada sektor prioritas dan pembiayaan inklusif dan/atau bank-bank yang memenuhi target RPIM berupa pengurangan kewajiban GWM harian sampai dengan sebesar 100 bps, mulai berlaku 1 Maret 2022.
 - Memperkuat implementasi kebijakan Rasio Pembiayaan Inklusif Makroprudensial (RPIM) terutama melalui pemenuhan komitmen bank terhadap target RPIM yang ditetapkan sesuai dengan keahlian dan model bisnis bank
 - Melanjutkan kebijakan makroprudensial akomodatif dengan mempertahankan (a) rasio *Countercyclical Capital Buffer (CCyB)* sebesar 0%, (b) Rasio Intermediasi Makroprudensial (RIM) pada kisaran 84-94% dengan parameter disinsentif batas bawah sebesar 84% sejak 1 Januari 2022, serta (c) rasio Penyangga Likuiditas Makroprudensial (PLM) sebesar 6% dengan fleksibilitas repo sebesar 6%, dan rasio PLM Syariah sebesar 4,5% dengan fleksibilitas repo sebesar 4,5%.
 - Memperkuat kebijakan transparansi suku bunga dasar kredit (SBDK) dengan pendalaman perkembangan *spread* suku bunga kredit terhadap suku bunga deposito per kelompok bank.
- Akselerasi digitalisasi sistem pembayaran untuk mendorong pemulihan ekonomi khususnya dari sisi konsumsi Rumah Tangga serta percepatan ekonomi dan keuangan yang inklusif dan efisien melalui:
 - Perluasan penggunaan QRIS melalui : (i) implementasi strategi 15 juta pengguna baru QRIS pada 2022 melalui kolaborasi dengan industri, Kementerian/Lembaga, dan komunitas, (ii) perluasan fitur-fitur QRIS, (iii) penyediaan model bisnis dan aspek teknis dalam rangka implementasi QRIS *cross border* dengan Malaysia.
 - Peningkatan peserta, perluasan layanan, serta akseptasi pemanfaatan BI-FAST untuk transaksi antar bank dan masyarakat yang lebih efisien.
 - Intensifikasi program elektronifikasi melalui : (i) digitalisasi Bansos, (ii) elektronifikasi layanan Pemda khususnya Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (P2DD), (iii) integrasi moda transportasi.
 - Ketersediaan Uang Rupiah dengan kualitas yang terjaga di seluruh wilayah NKRI melalui penguatan strategi digitalisasi dan perluasan distribusi uang, termasuk Program Ekspedisi Rupiah Berdaulat ke wilayah 3T (Terluar, Terdepan, Terpencil), serta perluasan gerakan Cinta Bangsa dan Paham (CBP) Rupiah.
- Akselerasi pendalaman pasar valas terhadap Rupiah dalam rangka mendukung stabilitas nilai tukar Rupiah, serta perluasan instrumen lindung nilai (hedging), dan fasilitasi perdagangan-investasi antarnegara, berupa:
 - Reformasi pengaturan pasar valuta asing, terutama mencakup: (i) Relaksasi ketentuan *threshold* kewajiban *underlying* transaksi spot dari USD25.000/bulan menjadi USD100.000/bulan, (ii) Pengembangan kurs acuan non Dolar Amerika Serikat terhadap Rupiah, (iii) Standarisasi instrumen untuk mendukung digitalisasi transaksi.
 - Perluasan penggunaan *Local Currency Settlement (LCS)* dengan melakukan sosialisasi.
- Memperkuat kebijakan ekonomi-keuangan inklusif dan hijau terutama dari sisi dunia usaha (permintaan kredit) ditujukan untuk mendukung pemulihan ekonomi yang berkelanjutan melalui program pengembangan UMKM dan pemberdayaan Perorangan Berpenghasilan Rendah untuk mendorong UMKM dan usaha syariah naik kelas, serta melalui penguatan kebijakan dan kelembagaan hijau Bank Indonesia untuk mendukung transisi menuju ekonomi rendah karbon.
- Memperkuat kebijakan internasional dengan memperluas kerja sama dengan bank sentral dan lembaga internasional lain, fasilitasi perdagangan dan investasi, serta bersama Kementerian Keuangan menyelesaikan 6 (enam) agenda prioritas jalur keuangan Presidensi Indonesia pada G20 tahun 2022.

1. EKONOMI GLOBAL

Pemulihan ekonomi global diprakirakan berlanjut di tengah kenaikan kasus Covid-19 varian Omicron, tekanan inflasi yang tinggi, dan percepatan normalisasi kebijakan moneter di beberapa bank sentral.

Pertumbuhan Ekonomi Global

2022 4,4%* (yoy)

* Prakiraan

Pemulihan tersebut diprakirakan akan berlangsung lebih seimbang, tidak hanya bertumpu pada Amerika Serikat (AS) dan Tiongkok, namun juga disertai dengan perbaikan ekonomi Eropa, Jepang, dan India.

Perbaikan yang terus berlangsung dikonfirmasi oleh kinerja sejumlah indikator pada Desember 2021 antara lain:

- Purchasing Managers' Index (PMI).
- Keyakinan konsumen.
- Penjualan ritel yang tetap kuat.

Volume perdagangan dan harga komoditas dunia masih meningkat, sehingga menantang prospek ekspor negara berkembang.

Pasar Keuangan Global

- Ketidakpastian pasar keuangan global masih berlanjut sejalan dengan percepatan kebijakan normalisasi the Fed sebagai respons tekanan inflasi di AS yang meningkat sejalan dengan gangguan rantai pasok dan kenaikan permintaan, serta tingginya penyebaran Covid-19 varian Omicron.
- Hal tersebut mengakibatkan terbatasnya aliran modal dan tekanan nilai tukar negara berkembang, termasuk Indonesia.

2. EKONOMI DOMESTIK

Perekonomian domestik diprakirakan tumbuh lebih tinggi pada 2022.

2021 3,2 - 4,0%* (yoy)

* Prakiraan

Desember 2021 Tahun 2022

Perkembangan indikator ekonomi mengindikasikan akselerasi proses pemulihan, antara lain:

- Mobilitas masyarakat.
- Penjualan eceran.
- Keyakinan konsumen.

Pertumbuhan ekonomi diprakirakan meningkat sejalan dengan akselerasi konsumsi swasta dan investasi, di tengah tetap terjaganya belanja fiskal Pemerintah dan ekspor, meski risiko kenaikan kasus Covid-19 perlu terus diwaspadai.

Kinerja lapangan usaha (LU) Utama, seperti industri pengolahan, perdagangan, konstruksi, dan pertanian tumbuh meningkat.

3. NERACA PEMBAYARAN INDONESIA (NPI)

Neraca Pembayaran Indonesia (NPI) diprakirakan tetap baik.

Transaksi Berjalan

Surplus NPI diprakirakan meningkat dibandingkan tahun sebelumnya, didukung surplus transaksi berjalan serta surplus transaksi modal dan finansial yang meningkat.

TRANSAKSI BERJALAN
Surplus **0,2%** dari PDB

Cadangan Devisa:
Akhir Desember 2021: **144,9** miliar dolar AS

Transaksi Modal dan Finansial

Memasuki awal tahun 2022 aliran masuk modal asing ke pasar keuangan domestik berlanjut.

INVESTASI PORTOFOLIO
Net Inflows **0,2** miliar dolar AS

sampai dengan 18 Januari 2022

Setara dengan pembiayaan **8,0** bulan impor atau **7,8** bulan impor dan pembayaran utang luar negeri pemerintah.

4. NILAI TUKAR RUPIAH

Nilai tukar Rupiah terjaga didukung oleh langkah-langkah stabilisasi Bank Indonesia dan ketahanan sektor eksternal Indonesia, di tengah ketidakpastian pasar keuangan global yang berlanjut.

19 Januari 2021

0,77% (ptp) **0,01%** (rerata)

Dibandingkan level Desember 2021

Perkembangan nilai tukar Rupiah tersebut disebabkan oleh:

- Aliran masuk modal asing yang masih terbatas di tengah terjaganya pasokan valas domestik.
- Persepsi positif terhadap prospek perekonomian domestik.

Bi terus memperkuat kebijakan stabilisasi nilai tukar Rupiah sesuai dengan fundamentalnya dan bekerjanya mekanisme pasar, melalui efektivitas operasi moneter dan ketersediaan likuiditas di pasar.

5. INFLASI

Inflasi 2021 tetap rendah dan mendukung stabilitas perekonomian.

INFLASI IHK **0,57%** (mtm) | **1,87%** (yoy)

INFLASI INTI **0,16%** (mtm) | **1,56%** (yoy)

VOLATILE FOOD **2,32%** (mtm) | **3,20%** (yoy)

ADMINISTERED PRICES **0,45%** (mtm) | **1,79%** (yoy)

Desember 2021

6. LIKUIDITAS

Kondisi likuiditas longgar didorong kebijakan moneter yang akomodatif dan dampak sinergi Bank Indonesia dengan Pemerintah dalam mendukung pemulihan ekonomi nasional.



7. SUKU BUNGA

Suku bunga kebijakan moneter yang tetap rendah dan likuiditas yang longgar mendorong suku bunga kredit perbankan dalam tren terus menurun.



8. SISTEM KEUANGAN

Ketahanan sistem keuangan tetap terjaga dan intermediasi perbankan melanjutkan perbaikan secara bertahap.



9. SISTEM PEMBAYARAN

Bank Indonesia akan melanjutkan digitalisasi sistem pembayaran untuk mendorong pemulihan ekonomi dan mempercepat pembentukan ekosistem ekonomi dan keuangan digital yang inklusif.

